

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA YANG DITEMPATKAN DI SEL PENGASINGAN

(Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara kelas II B Prabumulih)

Oleh

Dandi Prayoga Putra Pratama

Narapidana memiliki hak yang harus di akui dan dilindungi meskipun tengah menjalani proses masa hukuman terkhusus di dalam sel pengasingan, karena hak yang dirampas hanyalah status kemerdekaannya saja sedangkan hak – hak lainnya masih bisa di dapatkan dan di rasakan. Namun pada kenyataannya, hak – hak narapidana belum terpenuhi sepenuhnya seperti kasus yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada narapidana yang diberikan sanksi berupa sel pengasingan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat terpenuhinya hak-hak mereka selama di dalam sel pengasingan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji data sekunder berupa perundang – undangan, doktrin, penelitian terdahulu. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggambarkan implikasi hukum dilapangan melalui data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan narasumber terkait. Keseluruhan data yang di peroleh kemudian di analisis dengan analisis kualitatif serta penafsiran huku untuk menarik kesimpulan secara sistematis. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Prabumulih, Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Rutan Prabumulih berusaha memenuhi hak-hak dasar narapidana, dengan tetap memberikan fasilitas-fasilitas yang wajib didapatkan narapidana saat berada di dalam rumah tahanan negara seperti makan dan minum yang tetap diberikan, fasilitas kesehatan seperti obat-obatan, dan fasilitas ibadah yang tetap disediakan, serta membagi narapidana yang berada dikurungan sunyi ke sel mapenaling agar tidak terlalu berdesak-desakan, namun hak narapidana belum terpenuhi sepenuhnya seperti lama waktu narapidana melebihi waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan Seperti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dan

Dandi Prayoga Putra Pratama

Rumah Tahanan Negara. Faktor penghambat utama dalam pemenuhan hak-hak narapidana termasuk over kapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman petugas mengenai regulasi yang ada.

Saran penelitian ini adalah agar penegak hukum meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan serta pemahaman hukum, perbaikan fasilitas, dan penguatan regulasi internal dan standar operasional prosedur (SOP) khusus mengenai pelaksanaan sanksi pengasingan di lingkungan masyarakat, agar terdapat kejelasan durasi, Hak-Hak yang tetap harus dipenuhi, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan sel pengasingan

Kata Kunci: Perlindungan Hak, Narapidana, Sel Pengasingan

ABSTRACT

PROTECTION OF THE RIGHTS OF PRISONERS PLACED IN SOLIDATED CELLS (Case Study of the Class IIB Prabumulih State Detention Center)

By

Dandi Prayoga Putra Pratama

Prisoners have rights that must be recognized and protected even while serving their sentences, especially in solitary confinement. The only right deprived is their freedom, while other rights are still available and enjoyed. However, in reality, prisoners' rights are not fully fulfilled, as is the case at the Class II B Prabumulih State Detention Center. The main focus of this study is to determine and understand how legal protection is provided to prisoners sentenced to solitary confinement and the factors that hinder the fulfillment of their rights while in solitary confinement.

The research methods used in this study are normative and empirical juridical approaches. The normative juridical approach is used to examine secondary data in the form of legislation, doctrine, and previous research. The empirical juridical approach is used to illustrate the legal implications in the field through primary data sourced from interviews with relevant sources. All data obtained are then analyzed using qualitative analysis and legal interpretation to draw systematic conclusions. The informants for this study included the Head of the Security Unit of Class II B Prabumulih Detention Center, inmates at the Class II B Prabumulih State Detention Center, and a lecturer in the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the study indicate that although the Prabumulih Detention Center strives to fulfill the basic rights of inmates, by continuing to provide the facilities required of inmates while incarcerated, such as food and drink, health care facilities such as medication, and prayer facilities. Inmates in solitary confinement are also divided into separate cells to minimize overcrowding, inmates' rights are not fully met, as inmates' sentences exceed the time stipulated in laws and regulations, such as Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and State Detention Centers. The main inhibiting factors in fulfilling inmates' rights include overcrowding, limited facilities and infrastructure, and staff's lack of understanding of existing regulations.

Dandi Prayoga Putra Pratama

The research suggests that law enforcement officers should improve their capacity through training and legal understanding, facility improvements, and strengthening internal regulations and standard operating procedures (SOP) specifically regarding the implementation of isolation sanctions in correctional settings, ensuring clarity regarding duration, rights that must be fulfilled, implementation procedures, and strict oversight mechanisms for the implementation of isolation.

Keywords: Rights Protection, Prisoners, Isolation Cells